



LAPORAN KINERJA DITJEN PSDKP

TRIWULAN II TAHUN 2024



KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Direktorat Jenderal PSDKP Triwulan II Tahun 2024 disusun sebagai amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP. Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PSDKP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan kementerian Kelautan dan Perikanan dan Rencana Strategis Ditjen PSDKP Tahun 2020-2024.

Kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) sepanjang triwulan II tahun 2024 telah menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian kerjanya, dibuktikan dengan pencapaian kinerja triwulan II tahun 2024 dengan nilai sebesar **112,92%**, dengan kategori “**istimewa**”. Untuk itu kami memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas pencapaian tersebut, yang merupakan hasil kerja seluruh pegawai Ditjen. PSDKP.

Pada akhirnya kami mengajak kepada seluruh jajaran Ditjen PSDKP, bahwa tantangan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2024 semakin besar, kita harus secara bersama-sama mengawal seluruh kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan terutama implementasi 5 (lima) kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan berbasis ekonomi biru. Semoga kinerja pengawasan SDKP kedepan terus meningkat, dengan semangat **PILAR Ditjen. PSDKP** yaitu “**Profesional, Integritas, Loyalitas, inovAtif dan sineRgi**” dan **core value “ASN BerAKHLAK”** mewujudkan **PSDKP PANTANG TERCELA**.

Jakarta, Juli 2024
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi, M.M.

DAFTAR ISI

i

Kata Pengantar

ii

Ikhtisar Eksekutif

1

Bab I Pendahuluan

2

Bab II Perencanaan Kinerja

3

Bab III Akuntabilitas Kinerja

4

Bab IV Penutup

IKHTISAR EKSEKUTIF

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020 – 2024 Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) ditetapkan untuk menjadi acuan kinerja dan kegiatan selama periode 5 tahun, kemudian disusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja. Melalui perjanjian kinerja tersebut, Ditjen PSDKP menetapkan 5 (lima) Sasaran Program dan 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja yang terdiri dari 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 14 Indikator Kinerja Manajemen (IKM) yang menjadi target Ditjen. PSDKP di tahun 2024.

Nilai Pencapaian Indikator Kinerja Ditjen PSDKP triwulan II Tahun 2024 mencapai **112,92%**, dengan kategori **“istimewa”**. Pada triwulan II tahun 2024, seluruh IKU Ditjen PSDKP tercapai melebihi target yang ditetapkan, Secara ringkas capaian kinerja Ditjen PSDKP Triwulan II Tahun 2024, sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target 2024	Target Triwulan II	Realisasi	%
1	Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab (nilai)	74	-	-	-
2	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)	89	36	37,30	103,61
3	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan SDKP (%)	100	100	100	100
4	Indeks Kinerja Operasi Armada PSDKP (indeks)	91	91	95,93	105,42
5	Indeks Kinerja Pengawasan SDKP (indeks)	81	66	70,33	106,56
6	Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (indeks)	80	55	74,77	120
7	Indeks kinerja penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	80	50	95,91	120
8	Indeks kinerja Penanganan Tindak Pidana bidang Kelautan dan Perikanan	86	50	92,63	120
9	Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP (nilai)	70	-	-	-
10	Unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Ditjen PSDKP	15	-	-	-

No.	Indikator Kinerja	Target 2024	Target Triwulan II	Realisasi	%
11	Level Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Direktorat Jenderal PSDKP (level)	3,3	-	-	-
12	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)	82	77	83,54	108,49
13	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Ditjen. PSDKP (nilai)	84	-	-	-
14	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Direktorat Jenderal PSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2023 (%)	≤0,5	-	-	-
15	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen. PSDKP(%)	80	80	99,19	120
16	Persentase Unit Kerja Lingkup Ditjen. PSDKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (%)	94	94	133,33	120
17	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen PSKP (%)	80%	-	-	-
18	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen PSDKP (%)	80%	-	-	-
19	Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PSDKP (nilai)	76	-	-	-
20	Indeks Kepuasan Masyarakat unit layanan publik Ditjen PSDKP	85	85	91,32	107,44
21	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	93,76	83	90,48	109,01
22	Nilai NKA lingkup Ditjen. PSDKP (nilai)	86	-	-	-

Capaian tersebut tidak terlepas dari dilaksanakannya kegiatan pengawasan SDKP sampai dengan triwulan II tahun 2024 antara lain: pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, Operasi Kapal Pengawas, Operasi Speedboat, *Airborne Surveillance*, operasional pusat pengendalian, pembangunan prasarana pengawasan SDKP, perawatan sarana pengawasan SDKP serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan. Selain kegiatan teknis tersebut, keberhasilan pencapaian kinerja Ditjen PSDKP juga didukung oleh pelaksanaan kegiatan manajerial antara lain: kegiatan penunjang indeks profesionalitas ASN lingkup Ditjen PSDKP, penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP, penerapan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar, layanan kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik, serta peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen PSDKP.

Alokasi anggaran Ditjen. PSDKP TA. 2024 sebesar Rp. 1.141.397.068.000,-. Anggaran tersebut didistribusikan pada 5 (lima) satker pusat, 14 (empat belas) UPT Pengawasan SDKP dan 34 (tiga puluh empat) satker Dekonsentrasi/TP. Realisasi Anggaran Ditjen. PSDKP sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp. 394.768.348.351,- atau sebesar 34,59% secara aktual atau 50,47% jika tanpa Automatic Adjustment serta memasukkan Outstanding Kontrak (OK).

BAB I PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) merupakan bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan diberikan tugas dan fungsi melaksanakan penataan dan penegakan hukum terhadap peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) yang tertib dan bertanggung jawab, sebagai salah satu perwujudan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024 (Renstra KKP) yaitu pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Peran tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui program/kegiatan pengawasan SDKP yang secara garis besar dirumuskan dalam Rencana Strategis Pengawasan SDKP. Dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2021-2024, Menteri Kelautan dan Perikanan mempunyai 5 (lima) program khusus berbasis ekonomi biru, yaitu:

Kebijakan Ekonomi Biru



Memperluas Kawasan Konservasi Laut



Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota



Pengembangan Perikanan Budidaya di Laut, Pesisir, dan Darat yang Berkelanjutan



Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil



Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan

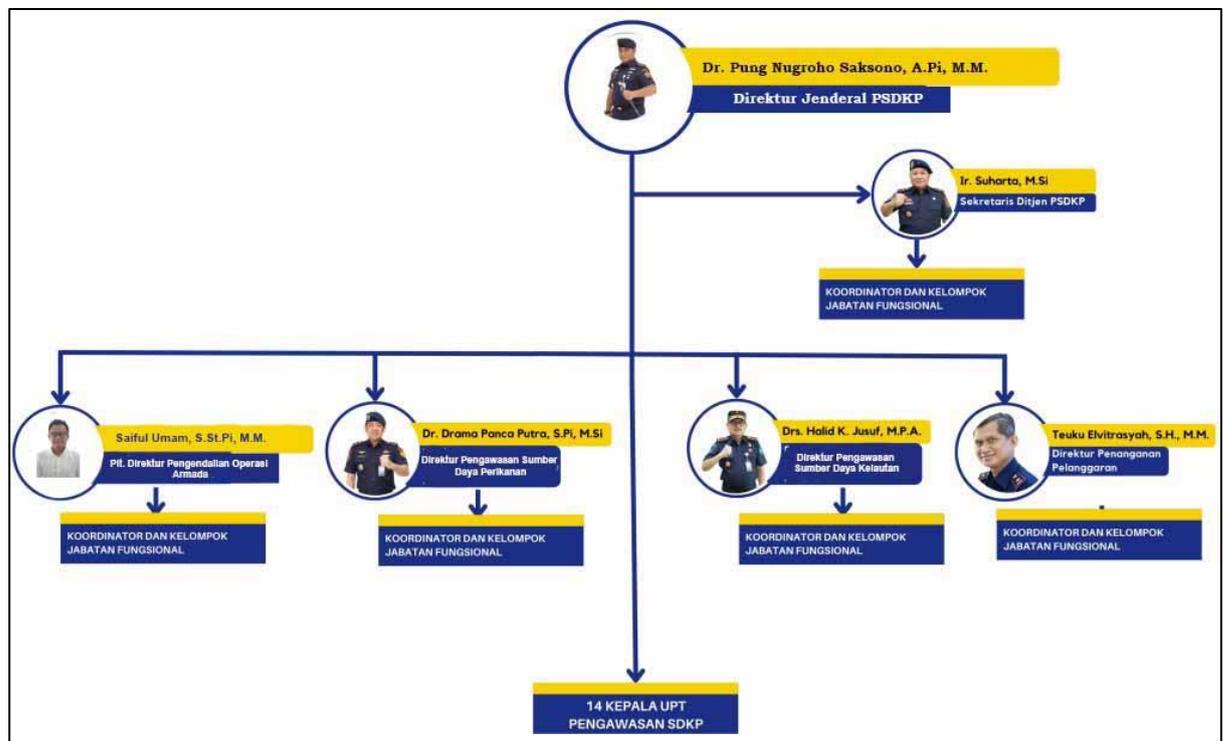
A. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 5/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen. PSDKP menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan kelautan, pengelolaan ruang laut, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan kelautan, pengelolaan ruang laut, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan pengelolaan kelautan, pengelolaan ruang laut, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan pengelolaan kelautan, pengelolaan ruang laut, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan kelautan, pengelolaan ruang laut, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal PSDKP

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi tersebut ditetapkan struktur Organisasi Ditjen PSDKP sebagai berikut:



B. Isu Strategis Pengawasan SDKP

Isu strategis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan antara lain:

1. Pemanfaatan Ruang laut membutuhkan pengawasan secara tegas dalam mengawal kebijakan prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Masih banyak pelaku usaha yang memanfaatkan ruang laut baik diwilayah pesisir, pulau-pulau kecil maupun kawasan konservasi belum memiliki perizinan.
2. Distribusi importasi hasil perikanan tidak sesuai peruntukannya yang mengancam hasil tangkapan nelayan lokal.
3. Pengenaan sanksi administrasi bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan sebagai upaya penegakkan hukum dibidang kelautan dan perikanan pasca Undang-undang Cipta Kerja. Adapun penindakan hukum menjadi langkah terakhir yang dilakukan untuk penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan.
4. Praktik *IUU fishing* yang masih marak terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) baik dalam bentuk pencurian ikan oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) maupun penangkapan ikan dengan cara merusak (*destructive fishing*) dan tidak sesuai ketentuan oleh kapal-kapal perikanan Indonesia (KII).

C. Sistematika Laporan Kinerja

Mengacu Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2015 secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Ditjen. PSDKP diuraikan sebagai berikut :

<p>BAB I PENDAHULUAN</p> <p>Menguraikan secara ringkas tentang kondisi umum yang mencakup tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP, isu aktual pengawasan SDKP, serta struktur organisasi Ditjen. PSDKP</p>	<p>BAB II PERENCANAAN KINERJA</p> <p>Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Penetapan Kinerja tahun 2024</p>
<p>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</p> <p>Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2024</p>	<p>BAB IV PENUTUP</p> <p>Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan</p>

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Ditjen PSDKP

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Melalui Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 23/KEP.DJ-PSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen. PSDKP diuraikan sebagai berikut:

1. Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen. PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi Ditjen PSDKP adalah:

“Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan”

Dengan misi:

- 1 Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi
- 2 Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan
- 3 Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggungjawab;
- 4 Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen PSDKP

2. Tujuan Dan Sasaran

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Ditjen. PSDKP maka dirumuskan beberapa Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024. Tujuan yang dimaksud adalah Tujuan KKP

tahun 2020-2024 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP, yaitu:

- 1) Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan terutama berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 2) Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui peningkatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 3) Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 4) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen. PSDKP.

Berdasarkan Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 tersebut maka disusunlah Sasaran Program Ditjen. PSDKP yang dirumuskan dari Sasaran Strategis KKP tahun 2020-2024 sebagaimana berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat
2. Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat
3. Pemantauan dan Operasi Armada efektif
4. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP
5. Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas

3. Indikator Kinerja Program

Berdasarkan rumusan Program dan Sasaran Program KKP, Ditjen. PSDKP berkontribusi pada 1 (satu) program teknis dan 1 (satu) program generik. Program Teknis adalah instrumen kebijakan teknis yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal) yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi KKP dalam periode waktu jangka menengah (5 tahun) yang bersifat indikatif. Sedangkan Program Generik adalah program yang bersifat pelayanan internal untuk menunjang pelaksanaan Program Teknis. Selanjutnya, untuk mengukur sejauh mana program-program tersebut efektif bekerja, maka dirumuskan Indikator Kinerja Program sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian setiap Sasaran Program (*outcome*).

Pada Indikator Kinerja Program tersebut ditetapkan pula satuan dan indikasi targetnya selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

Tabel Indikator Kinerja Program Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024

Program 1 Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							
Sasaran program Indikator Kinerja	Satuan	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.1	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat						
	Tingkat partisipasi Pokmaswas Dalam Mendukung Pengawasan SDKP (%)	Persentase	85	86	87	88	90
1.2	Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat						
	Persentase kepatuhan (<i>Compliance</i>) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Persentase	94	95	96	97	98
1.3	Pemantauan dan Operasi Armada efektif						
	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing (%)	Persentase	54,18	60	65	70	75
	Indeks kinerja Operasi Armada Pengawasan SDKP (indeks)	Indeks	86,72	87	87,5	88	89
1.4	Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas						
	Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan(%)	Persentase	93	93	93	93	93
Program 2 Dukungan Manajemen							
Sasaran program Indikator Kinerja	Satuan	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024	
2.1	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP						
	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	Nilai	30	31	32	33	34
	Unit Kerja Ditjen. PSDKP Berpredikat Menuju WBK (unit)	Unit	4	5	6	7	8
	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPSDKP (%)	Persentase	1	1	1	1	1
	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)	indeks	72	73	74	75	76
	Nilai PM SAKIP Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)	Nilai	87,00	87,15	87,25	87,50	87,75
	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit)	Unit	1	1	1	1	1
	Level maturitas SPIP lingkup Ditjen PSDKP (level)	Level	3	3	3	3	3
	Persentase unit kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	Persentase	82	84	86	88	90
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen. PSDKP (%)	Persentase	60	65	70	75	80
	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP (indeks)	Indeks	88	89	89	90	90

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	Nilai	85	86	87	88	89
---	-------	----	----	----	----	----

Sumber: Kepdirjen Nomor 23a tentang Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2020-2024

Dalam perkembangan pelaksanaan kebijakan pengawasan SDKP setiap tahunnya telah terjadi perubahan sesuai dengan program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kondisi tersebut berdampak terhadap indikator kinerja tahun 2022 berbeda dengan yang tercantum dalam renstra 2020-2024 yang selanjutnya dilakukan reviu terhadap renstra. Perubahan beberapa indikator kinerja tahun 2024 sebagaimana dibahas dibawah ini.

B. Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2024 Ditjen PSDKP telah menetapkan 5 (lima) sasaran program dan 22 (dua puluh dua) IKU. Sasaran Program yang mengalami perubahan dan penambahan pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel Perubahan Sasaran Program Tahun 2022-2024

Sasaran pada renstra 2020-2024	Sasaran Program pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat	Kesadartahuan dan peran serta masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat
Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat	-
Pemantauan dan Operasi Armada efektif	-
Tidak ada	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang efektif
Tidak ada	Penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif
Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas	Penanganan tindak pidana bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif
Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP	Tetap

Sementara itu, perubahan beberapa indikator kinerja, sebagai berikut:

Tabel Perubahan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja pada renstra 2020-2024	Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024	Keterangan
Tingkat partisipasi Pokmaswas Dalam Mendukung Pengawasan SDKP (%)	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)	Hasil pembahasan Tim perencanaan kinerja Ditjen PSDKP
Tidak ada	Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang	Hasil pembahasan Tim perencanaan kinerja Ditjen PSDKP

Indikator Kinerja pada renstra 2020-2024	Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024	Keterangan
	tertib dan bertanggung jawab (nilai)	
Persentase kepatuhan (<i>Compliance</i>) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Tidak ada	Hasil pembahasan Tim perencanaan kinerja Ditjen PSDKP menjadi IKU level 0
Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing (%)	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan Pemanfaatan SDKP	Menindaklanjuti arahan Menteri Kelautan dan Perikanan pada Dialog Kinerja tahun 2022 agar pemantauan SDKP menggunakan Satelit, sehingga nomenklatur dan formulasi penghitungannya disesuaikan menggunakan teknologi citra satelit
Tidak ada	Indeks Kinerja Pengawasan SDKP (indeks)	Hasil pembahasan Tim perencanaan kinerja Ditjen PSDKP
Tidak ada	Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (indeks)	Hasil pembahasan Tim perencanaan kinerja Ditjen PSDKP
Tidak ada	Indeks kinerja penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	Hasil pembahasan Tim perencanaan kinerja Ditjen PSDKP
Tidak ada	Indeks kinerja Penanganan Tindak Pidana bidang Kelautan dan Perikanan	Hasil pembahasan Tim perencanaan kinerja Ditjen PSDKP

Mempertimbangkan beberapa perubahan tersebut, maka perjanjian Kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2024 disajikan berikut:

Tabel Perjanjian Kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2024

Sasaran Program 1 : Kesadartahuan dan peran serta masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab	nilai	74
2	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP	%	89
Sasaran Program 2 : Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang efektif			
3	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan SDKP	%	100%
4	Indeks Kinerja Operasi Armada PSDKP	Indeks	91
5	Indeks Kinerja Pengawasan SDKP	Indeks	81
6	Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP	Indeks	80
Sasaran Program 3 : Penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
7	Indeks kinerja penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan	Indeks	80
Sasaran Program 4 : Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif			
8	Indeks kinerja Penanganan Tindak Pidana bidang Kelautan dan Perikanan	Indeks	86
Sasaran Program 5 : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Ditjen PSDKP			

	Indikator Kinerja	Satuan	Target
9	Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP	Indeks	70
10	Unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Ditjen PSDKP	Unit	15
11	Level Maturitas SPIP Ditjen. PSDKP	level	3,3
12	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	Indeks	82
13	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Ditjen. PSDKP	Nilai	84
14	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Direktorat Jenderal PSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2022	%	≤0,5
15	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen. PSDKP	%	80
16	Persentase Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Ditjen. PSDKP	%	94
17	Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PSDKP	Nilai	75
18	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen PSDKP	Persentase	80
19	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen PSDKP	Persentase	80
20	Nilai hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PSDKP	Nilai	76
21	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP	Nilai	93,76
22	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Ditjen. PSDKP	Nilai	86

C. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen utama implementasi pengelolaan kinerja dalam rangka menjamin akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi data kinerja yang akan dan seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja Ditjen. PSDKP dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual Indikator Kinerja.

Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung secara berkala (triwulanan) dan tahunan dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut, dimasukkan kedalam Sistem Aplikasi Kinerjajaku berbasis informasi teknologi melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>, dan dituangkan dalam Laporan Kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan pembahasannya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pengawasan SDKP

Dalam pengelolaan kinerja Ditjen. PSDKP telah menetapkan 5 (lima) Sasaran Program dengan 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja. Nilai Kinerja Organisasi Ditjen. PSDKP pada triwulan II tahun 2024 sebesar **112,92%**, dengan kategori “Istimewa” yang diperoleh dari capaian Indikator kinerja utama dan indikator kinerja manajerial. Capaian kinerja Ditjen PSDKP Triwulan II Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel Capaian Indikator Kinerja Ditjen.PSDKP Triwulan II Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target 2024	Target Triwulan II	Realisasi	%
1	Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab (nilai)	74	-	-	-
2	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)	89	36	37,30	103,61
3	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan SDKP (%)	100	100	100	100
4	Indeks Kinerja Operasi Armada PSDKP (indeks)	91	91	95,93	105,42
5	Indeks Kinerja Pengawasan SDKP (indeks)	81	66	70,33	106,56
6	Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (indeks)	80	55	74,77	120
7	Indeks kinerja penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	80	50	95,91	120
8	Indeks kinerja Penanganan Tindak Pidana bidang Kelautan dan Perikanan	86	50	92,63	120
9	Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP (nilai)	70	-	-	-
10	Unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Ditjen PSDKP	15	-	-	-
11	Level Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Direktorat Jenderal PSDKP (level)	3,3	-	-	-

No.	Indikator Kinerja	Target 2024	Target Triwulan II	Realisasi	%
12	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)	82	77	83,54	108,49
13	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Ditjen. PSDKP (nilai)	84	-	-	-
14	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Direktorat Jenderal PSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2023 (%)	≤0,5	-	-	-
15	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen. PSDKP(%)	80	80	99,19	120
16	Persentase Unit Kerja Lingkup Ditjen. PSDKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (%)	94	94	133,33	120
17	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen PSKP (%)	80%	-	-	-
18	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen PSDKP (%)	80%	-	-	-
19	Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PSDKP (nilai)	76	-	-	-
20	Indeks Kepuasan Masyarakat unit layanan publik Ditjen PSDKP	85	85	91,32	107,44
21	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	93,76	83	90,48	109,01
22	Nilai NKA lingkup Ditjen. PSDKP (nilai)	86	-	-	-

B. Evaluasi Dan Analisis

SASARAN PROGRAM 1

KESADARTAHUAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN SDKP MENINGKAT

IKU 1. Nilai Pemahaman Masyarakat Dalam Pemanfaatan SDKP Yang Tertib dan Bertanggungjawab

Realisasi Triwulan II Tahun 2020-2023					Tahun 2024				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW II 2024	Realisasi TW II 2024	% thd TW II 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	82,74	74	-	-	-	-	-	-

Indikator kinerja ini tidak ditargetkan pencapaiannya pada triwulan II, sehingga belum ada realisasinya, namun terdapat kegiatan utama yang mendukung pencapaian telah dilaksanakan yaitu:

Persiapan Kegiatan Pemberian Pemahaman Nelayan untuk Tidak Melintas Batas dan Menangkap Ikan di Perairan Negara Lain Tanpa Ijin Tahun 2024. Kegiatan ini direncanakan pada tanggal 10 Juli 2024 di Desa Paluh Sibaji, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Adapun kegiatan tersebut direncanakan akan dihadiri oleh 150 orang peserta yang terdiri atas nelayan pemilik kapal, dan keluarga nelayan dari Desa Paluh Sibaji dan Desa Pantai Labu Pekan. Selain itu, kegiatan tersebut juga direncanakan akan dihadiri oleh Pemda Kabupaten Deli Serdang, Kab. Langkat, Lantamal I Belawan, Kepala Desa, dan Pemda Provinsi.

Selain kegiatan di Deli Serdang, pemberian pemahaman nelayan juga akan dilaksanakan di Kupang, NTT pada akhir bulan Juli 2024.

IKU 2. Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP

Realisasi Triwulan II Tahun 2020-2023					Tahun 2024				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW II 2024	Realisasi TW II 2024	% thd TW II 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	41,98	89	36	37,30	103,61	41,91	-	-

Pada triwulan II, capaian persentase pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP adalah sebesar 37,30%. Hal ini diperoleh dari perbandingan antara target jumlah Pokmaswas sesuai target prioritas Nasional sejumlah 1110 kelompok dengan Pokmaswas yang aktif untuk mendukung pengawasan SDKP sejumlah 414 kelompok. Persentase realisasi terhadap target triwulan II tahun 2024 sudah melebihi target yaitu sebesar 103,61%, sedangkan persentase terhadap target tahunan yaitu 41,91%. Jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan II tahun 2023 maka terdapat penurunan sebesar 4,61. Hal ini kemungkinan disebabkan karena

belum dilakukan pembinaan secara optimal di beberapa provinsi. Adapun rincian keaktifan pada tiap provinsi adalah sebagai berikut:

No.	Provinsi	Target	Jumlah
1	Aceh	15	0
2	Sumatera Utara	15	9
3	Sumatera Barat	59	0
4	Sumatera Selatan	38	0
5	Jambi	35	19
6	Bengkulu	24	0
7	Lampung	41	15
8	Riau	39	0
9	Kepulauan Riau	48	44
10	Kepulauan Bangka Belitung	33	19
11	Banten	14	19
12	DKI Jakarta	10	11
13	Jawa Barat	63	15
14	Jawa Tengah	35	0
15	Jawa Timur	52	0
16	DI Yogyakarta	38	15
17	Bali	37	29
18	NTB	48	0
19	NTT	24	9
20	Kalimantan Utara	16	8
21	Kalimantan Tengah	26	12
22	Kalimantan Selatan	88	26
23	Kalimantan Timur	14	12
24	Kalimantan Barat	34	0
25	Sulawesi Utara	33	16
26	Sulawesi Barat	17	9
27	Sulawesi Tengah	17	0
28	Sulawesi Tenggara	18	22
29	Sulawesi Selatan	44	27
30	Gorontalo	16	21
31	Maluku	12	14
32	Maluku Utara	31	0
33	Papua	6	0
34	Papua Barat	15	10
1	Lampulo	3	3
2	Batam	3	0
3	Jakarta	13	6
4	Bitung	7	3
5	Benoa	3	3
6	Belawan	1	0
7	Pontianak	4	3

No.	Provinsi	Target	Jumlah
8	Cilacap	13	11
9	Tarakan	1	0
10	Kupang	3	2
11	Ambon	3	1
12	Tual	1	1
	TOTAL	1110	414



PEMBINAAN Penguatan Peran Pokmaswas dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampung, 30 Mei 2024



Pembinaan penguatan peran Pokmaswas dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Lampung pada triwulan II tahun 2024.

IKU 3. Persentase Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) yang dipantau dari kegiatan Pemanfaatan SDKP

Realisasi Triwulan II Tahun 2020-2023					Tahun 2024					Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW II 2024	Realisasi TW II 2024	% thd TW II 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra	
-	-	112,9	100%	100%	100%	100%	100	100	-	-	

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini bertujuan untuk memastikan WPP-NRI atau Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terbebas dari kegiatan *IUU Fishing. Illegal, Unreported and Unregulated Fishing [IUU Fishing]* yaitu kegiatan perikanan melanggar hukum, tidak dilaporkan dan tidak diatur yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia [KII] di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia [WPP NRI]. Pemantauan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di WPP NRI dilakukan dengan menggunakan teknologi satelit.

Sampai dengan triwulan II tahun 2024, Indikator Kinerja telah tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu 11 WPPNRI. Pencapaian IKU “Persentase cakupan WPP-NRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan SDKP” diperoleh dari hasil pemantauan terhadap aktivitas kapal-kapal diseluruh WPPNRI. Pemantauan menggunakan citra satelit antara lain *Automatic Identification System (AIS)*, Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) dan pemantauan kapal perikanan di Kawasan Konservasi.

Pemantauan kapal perikanan melalui Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) menggunakan *Vessel Monitoring System (VMS)*, dimana kapal perikanan telah mengajukan dan mengaktifkan transmitter yang terpasang dikapal. Sistem ini hanya ada pada Kapal perikanan yang berbendera Indonesia serta telah mengajukan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT). Berdasarkan hasil pemantauan melalui SPKP pada periode triwulan II Tahun 2024, Bulan April terpantau sebanyak 4.740 kapal yang beroperasi di seluruh WPPNRI, kemudian pada bulan Mei sebanyak 5.404 kapal dan pada bulan Juni sebanyak 5.263 kapal. Rekapitulasi hasil pemantauan kapal perikanan sepanjang periode triwulan II Tahun 2024, disajikan pada Tabel berikut:

Tabel
Pemantauan Kapal melalui SPKP Triwulan II Tahun 2024

WPPNRI	April	Mei	Juni
571	52	60	58
572	230	285	284
573	508	495	449
711	773	820	764
712	1935	2116	1842
713	71	275	274
714	75	105	138
715	332	320	321
716	120	90	79
717	146	173	168
718	498	665	886
Total	4740	5404	5263

Tabel. Pemantauan WPP NRI menggunakan VMS pada triwulan II tahun 2024

No	WPPNRI	BUKTI SS HASIL PEMANTAUAN		
		APRIL	MEI	JUNI
1	718			
2	717			
3	716			
No	WPPNRI	BUKTI SS HASIL PEMANTAUAN		
		APRIL	MEI	JUNI
4	715			
5	714			
6	713			
No	WPPNRI	BUKTI SS HASIL PEMANTAUAN		
		APRIL	MEI	JUNI
7	712			
8	711			
9	573			

No	WPPNRI	BUKTI SS HASIL PEMANTAUAN		
		APRIL	MEI	JUNI
10	572			
11	571			

Pemantauan kapal menggunakan AIS telah dilakukan diseluruh WPPPNRI, tercatat sebanyak 823 kapal pada bulan April, kemudian pada bulan Mei terdapat 17.350 kapal, dan pada bulan Juni sebanyak 18.535 kapal. Kapal yang terpantau adalah semua jenis kapal yang melakukan operasi atau berlayar, tidak hanya kapal perikanan saja, termasuk juga kapal jenis lain baik berbendera Indonesia ataupun berbendera asing yang melintas di WPPNRI. Rekapitulasi hasil pemantauan kapal menggunakan AIS disajikan pada Tabel berikut:

Tabel Pemantauan kapal melalui AIS pada Triwulan II tahun 2024

WPPNRI	April	Mei	Juni
571	33	838	1019
572	30	564	581
573	54	871	937
711	247	3850	5440
712	216	4108	3557
713	40	3270	2501
714	18	822	848
715	65	639	682
716	9	237	391
717	22	145	159
718	89	2006	2420
Total	823	17350	18535

Tabel Pemantauan WPP NRI menggunakan AIS

No	WPPNRI	BUKTI SS HASIL PEMANTAUAN		
		APRIL	MEI	JUNI
1	718			
2	717			
3	716			

No	WPPNRI	BUKTI SS HASIL PEMANTAUAN		
		APRIL	MEI	JUNI
4	715			
5	714			
6	713			

No	WPPNRI	BUKTI SS HASIL PEMANTAUAN		
		APRIL	MEI	JUNI
7	712			
8	711			

No	WPPNRI	BUKTI SS HASIL PEMANTAUAN		
		APRIL	MEI	JUNI
9	573			
10	572			

No	WPPNRI	BUKTI SS HASIL PEMANTAUAN		
		APRIL	MEI	JUNI
11	571			

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU 31/2004, menjelaskan bahwa konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. Dalam konteks konservasi sumber daya ikan, konservasi ekosistem merupakan upaya melindungi, melestarikan dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan biota perairan pada waktu sekarang dan yang akan datang.

Pemantauan dikawasan konservasi dilakukan untuk memantau kapal-kapal yang melakukan aktivitas dikawasan tersebut. Pada triwulan II 2024, dilaksanakan pemantauan di kawasan konservasi. Berdasarkan hasil pemantauan sebanyak 485 kapal terdiri atas 129 kapal beroperasi dibulan April, 306 di bulan Mei dan 50 di bulan Juni 2024.



Gambar Hasil pemantauan VMS di kawasan konservasi periode April – Juni 2024

Realisasi tahun triwulan II 2024 jika dibandingkan dengan periode triwulan II tahun 2023, sama yaitu 100%, namun berbeda pada tahun 2022. Perbedaan tersebut disebabkan perbedaan formulasi perhitungan, dimana pada tahun 2022 menggunakan data kapal perikanan yang mengaktifkan transmitter dibandingkan dengan jumlah SKAT yang diterbitkan sedangkan ditahun 2023 dan 2024 yang dihitung capaian adalah jumlah WPPNRI yang terpantau. Pada Renstra 2020-2024 indikator kinerjanya adalah

Persentase Cakupan WPP-NRI yang dipantau dari kegiatan *Illegal fishing* dengan target 75%, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan target renstra.

IKU 4. Indeks Kinerja Operasi Armada PSDKP

Realisasi Triwulan II Tahun 2020-2023					Tahun 2024				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW II 2024	Realisasi TW II 2024	% thd TW II 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	95,78	91	91	95,93	105,42	95,93	-	-

Indeks Kinerja Operasi Armada PSDKP pada triwulan II tahun 2024 mencapai 95,93. Capaian Indeks kinerja operasi armada Pengawasan SDKP diperoleh dari capaian 3 (tiga) komponen armada pengawasan yang dimiliki oleh Ditjen PSDKP yaitu a) Kapal Pengawasan Kelautan dan Perikanan; b) Speedboat Pengawas; dan c) Pesawat Patroli. Masing-masing capaian dari ketiga armada pengawasan tersebut, sebagai berikut:

Indeks Kinerja	Nilai
Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	95,35
Speedboat Pengawas	95,22
Pesawat Patroli	97,23
	95.93

Capaian tersebut sudah melebihi target triwulan II dan target tahunan 2024 sebesar 91. Capaian ini juga sedikit meningkat jika dibandingkan dengan hasil capaian pada triwulan II tahun 2023 sebesar 0,15. Adapun komponen pembentuk capaian tersebut berupa:

Kinerja Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan

Ditjen PSDKP memiliki 34 Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang bertugas melakukan pengawasan dilaut serta mempunyai wewenang untuk memeriksa dan menangkap kapal perikanan apabila terindikasi melakukan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan beroperasi diseluruh WPPNRI dengan target hari operasi tahun 2024 sebanyak 75 hari Operasi. Penempatan Kapal Pengawas KP tersebar di 14 Pangkalan Pengawasan SDKP diseluruh Indonesia untuk beroperasi di 11 WPPNRI. Sebaran Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan, dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



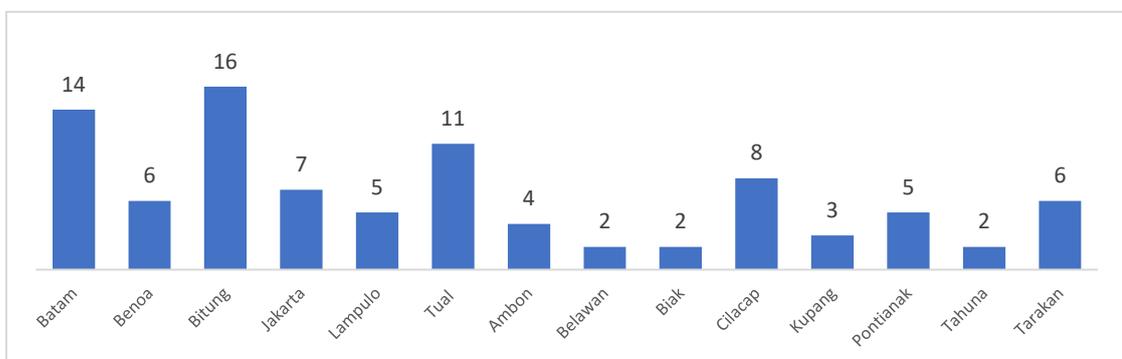
Gambar Sebaran Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan

Pada periode triwulan II tahun 2024, rata-rata hari operasi 27 hari operasi dan berhasil memeriksa 2.535 Kapal terdiri dari 2.520 KII dan 15 KIA, 7 rumpun, dan 102 total objek pengawasan sumber daya kelautan (termasuk kapal kelautan). Dari hasil pemeriksaan tersebut, ditangkap dan diproses sebanyak 89 kapal terdiri dari 75 KII dan 14 KIA. Seluruh kapal yang ditangkap selanjutnya diproses hukum oleh PPNS Perikanan Pangkalan Pengawasan SDKP.



Kinerja Speedboat Pengawas

Tahun 2024, Ditjen PSDKP mengoperasikan 91 *speedboat* pengawas untuk beroperasi di wilayah laut kurang dari 12 mil serta di kawasan konservasi. Operasional speedboat dilakukan oleh UPT Pengawasan SDKP serta satuan pengawasan dibawahnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Speedboat yang dimiliki berbagai ukuran antara lain : Albacore (16 m), Napoleon (12 m), Hiu Biru (12 m), Dolphin (8 m), Marlin (6,5 m), dan Rubber Boat. Telah dilaksanakan operasi speedboat pengawasan s.d TW II dengan rata-rata hari operasi sebesar 6,7 hari operasi dan jumlah riksa sebanyak 1.055 kapal perikanan. Adapun jumlah tangkapan speedboat pengawasan sebanyak 12 KII dan 1 KIA.



Gambar 4. Sebaran speedboat pengawas di UPT PSDKP sebagai berikut:

Kinerja Pesawat Patroli

Pengawasan melalui Udara menggunakan pesawat patroli Hawker, King Air dan ATR. Operasi Patroli Udara s.d bulan Juni 2024 sebanyak 14 periode meliputi 109 hari operasi atau 4,15 jam terbang/hari yang dilakukan di sebagian WPPNRI 571, 572, 573, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718. Hasil pengawasan airborne surveillance yaitu 643 unit kapal perikanan terpantau, 125 unit rumpon tervalidasi, dan 47 objek kelautan terpantau.

IKU 5 Indeks Kinerja Pengawasan SDKP

Realisasi Triwulan II Tahun 2020-2023					Tahun 2024				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW II 2024	Realisasi TW II 2024	% thd TW II 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	62,44	81	66	70,33	106,56	86,83	-	-

Capaian indeks kinerja pengawasan SDKP pada triwulan II tahun 2024 sebesar 70,33. Hal ini sudah melebihi target triwulan II sebesar 66 dan melebihi capaian pada triwulan II tahun 2023, namun belum mencapai target tahunan 2024 sebesar 81. Adapun indeks kinerja pengawasan tersusun atas Pemeriksaan, verifikasi dan tindak lanjut pengawasan pelaku usaha kelautan dan Pemeriksaan, verifikasi dan tindak lanjut pengawasan pelaku usaha perikanan, sebagaimana berikut:

Pemeriksaan, verifikasi dan tindak lanjut pengawasan pelaku usaha kelautan

Pada triwulan II Tahun 2024 pelaku usaha kelautan diperiksa/diawasi sebanyak 717 pelaku usaha. Pemeriksaan dilakukan oleh Polsus PWP3K yang berada di UPT Pengawasan SDKP dan satuan pengawasan yang tersebar diseluruh Indonesia. Terdapat 9 (sembilan) objek yang dilakukan pengawasan, sebagai berikut :

No	Pengawasan	Diperiksa	Diverifikasi
1	Pemanfaatan ruang laut	97	97
2	Pemanfaatan pulau-pulau kecil	15	15
3	Pemanfaatan pesisir (reklamasi)	10	10
4	Jasa Kelautan	20	20
5	Produk kelautan	11	11
6	Pemanfaatan Kawasan konservasi nasional	43	43
7	Pemanfaatan ikan dilindungi darn/atau masuk Appendix CITES	97	97
8	Pencegahan pencemaran sumber daya ikan dan/atau lingkungannya	205	205
9	Destructive fishing	219	219
	Jumlah	717	717

Selain itu, adapun dari 94 rekomendasi pembinaan terhadap pelaku usaha kelautan pada triwulan II tahun 2024, telah ditindak lanjuti sebanyak 40 pelaku usaha atau sebesar 43%.

Pemeriksaan, verifikasi dan tindak lanjut pengawasan pelaku usaha perikanan

Pada triwulan II tahun 2024, jumlah pelaku usaha perikanan yang diperiksa oleh UPT Ditjen PSDKP sejumlah 1084 pelaku usaha dan sebanyak 889 pelaku usaha telah diverifikasi oleh Direktorat PSDP. Hasil pemeriksaan tersebut terdiri dari 4 subsektor sebagai berikut:

No	Subsektor	Diperiksa	Diverifikasi
1	Pengawasan penangkapan ikan	271	271
2	Pengawasan pengolahan perikanan	268	268
3	Pengawasan distribusi dan pemasaran hasil perikanan	118	99
4	Pengawasan pembudidayaan ikan	427	251
	Jumlah	1084	889

Pemeriksaan pelaku usaha dilakukan oleh pengawas perikanan di UPT Pengawasan SDKP secara rutin dan tidak rutin (mendukung Penangkapan Ikan terukur), sebagai berikut:

No	UPT PSDKP	Jumlah Pelaku yang Diperiksa
1	Batam	101
2	Benoa	58
3	Bitung	116
4	Jakarta	335
5	Lampulo	13
6	Tual	87
7	Ambon	51
8	Belawan	69
9	Biak	15
10	Cilacap	146
11	Kupang	9
12	Pontianak	70
13	Tahuna	3
14	Tarakan	11
	Jumlah	1084

Sebelumnya, pada triwulan I, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan telah menerbitkan surat kepada 5 UPT Ditjen PSDKP untuk menindaklanjuti 100 kode proyek yang mendapat rekomendasi pembinaan dan perbaikan. Berdasarkan hasil monitoring pada triwulan II, sebanyak 19 kode proyek telah ditindaklanjuti. Selain itu, pada awal Juli 2024, Direktorat PSDP juga telah bersurat kepada 12 UPT Ditjen PSDKP untuk menindaklanjuti 186 kode proyek yang mendapatkan rekomendasi pembinaan dan perbaikan.

IKU 6 Indeks Kesiapan Sarana Dan Prasarana Pengawasan SDKP

Realisasi Triwulan II Tahun 2020-2022				Tahun 2024					Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW II 2024	Realisasi TW II 2024	% thd TW II 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	63,35	80	55	74,77	120	93,46	-	-

Capaian Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP diperoleh dari indeks kesiapan sarana pengawasan SDKP sebesar 94,8 dan indeks kesiapan prasarana pengawasan SDKP sebesar 54,74. Jika dibandingkan dengan capaian triwulan II tahun 2023, maka nilainya meningkat 11,42. Pada tahun 2020-2022 belum dilakukan perhitungan karena IKU ini baru ada pada tahun 2023.

Kesiapan sarana pengawasan SDKP adalah kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Penilaian dilakukan terhadap kesiapan sarana pengawasan berupa laporan kondisi teknis (lapkonis) terhadap peralatan navigasi, peralatan komunikasi, perlengkapan keselamatan dan pemadam kebakaran, konstruksi kapal, perlengkapan tambat labuh, mesin utama, dan sistem propulsi, mesin bantu dan sistem perpompaan.

Kriteria kesiapan terbagi menjadi dua, nilai > 75% dinyatakan siap dan nilai <75 dinyatakan tidak siap. Penilaian terhadap kesiapan sarana pengawasan triwulan II terhadap 34 unit Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan dengan nilai total kesiapan sebesar 94,8. Adapun rekapitulasi indeks kesiapan sarana pengawasan triwulan II tahun 2024 sebagai berikut:

No	Nama Kapal	Penanggung Jawab	Nama Alat										Total Indeks
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	KP Orca 01	Dit. POA	5	5	5	10	2,5	2,5	50	10	5	3,4	98,4
2	KP Orca 02	Dit. POA	5	5	3,6	10	2,5	2,5	50	10	5	5	98,6
3	KP Orca 03	Dit. POA	5	5	4,7	10	2,2	2,5	50	10	5	4,6	99
4	KP Orca 04	Dit. POA	4	5	5	10	2,5	2,5	50	10	5	5	99
5	KP Orca 05	Dit. POA	5	5	5	10	2,5	2,5	50	10	5	5	100
6	KP Orca 06	Dit. POA	5	5	5	10	2,5	2,5	50	10	5	5	100
7	KP Barakuda 01	Dit. POA	4,8	5	4,8	10	2,5	2,5	50	10	4,4	4,7	98,7
8	KP Barakuda 02	Dit. POA	4,8	5	5	10	2,5	2,5	50	10	4,4	4,7	98,9
9	KP HMT 01	Dit. POA	4,2	4,4	4,8	10	2,5	1,5	50	6,7	4	4,1	92,2
10	KP HMT 02	Dit. POA	4	5	4,2	10	2,1	2,5	50	10	5	4,5	97,3
11	KP Paus 01	Dit. POA	5	5	5	10	2,1	2,5	50	6,6	5	5	96,2
12	KP HMC 01	PSDKP Pontianak	4	5	4,8	10	1,8	2,5	50	6,7	5	5	94,8
13	KP HMC 03	PSDKP Kupang	4	5	4,7	10	2,5	1,8	50	10	5	4,5	97,5
14	KP HMC 04	PSDKP Biak	4	4	5	5	2,5	2,5	50	10	1	4	88
15	KP HMC 05	PSDKP Batam	5	3,6	3,7	10	2,5	2,5	50	10	5	5	97,3
16	KP HMC 06	PSDKP Tual	4	4	5	10	2,5	2,5	50	10	5	4	97
17	KP Hiu 01	PSDKP Belawan	4	4,2	4,8	10	2,1	2,5	50	10	5	4,4	97
18	KP Hiu 02	PSDKP Bitung	4	4	4	10	2,5	2,5	50	10	5	3	95
19	KP Hiu 03	PSDKP Batam	4	4,1	3,8	8,7	1,8	2,5	0	6,6	5	3,8	40,3
20	KP Hiu 04	PSDKP Cilacap	3	4,1	2,6	10	1,4	1,8	50	6,6	5	3,3	87,8
21	KP Hiu 05	PSDKP Bitung	4	5	4	10	2,5	2,5	50	10	5	1	94
22	KP Hiu 06	PSDKP Jakarta	4	4,2	4,8	10	2,5	1,9	50	10	5	4,4	96,8
23	KP Hiu 07	PSDKP Tarakan	4	4,1	5	10	2,5	2,5	50	10	5	5	98,1
24	KP Hiu 08	PSDKP Belawan	5	5	4	9,6	1,8	2,5	50	10	5	4,4	97,3
25	KP Hiu 09	PSDKP Benoa	4,1	4	4,4	10	2	1,67	50	10	5	5	96,17
26	KP Hiu 10	PSDKP Jakarta	5	4,1	4,2	10	1,8	2,5	50	10	5	5	97,6
27	KP Hiu 11	PSDKP Pontianak	5	3,3	5	9,5	2,1	2,5	33,3	10	5	4,4	80,1
28	KP Hiu 12	PSDKP Lampulo	4,8	4,2	4,8	10	1,4	2,5	50	10	5	5	97,7
29	KP Hiu 13	PSDKP Ambon	4,5	5	5	10	2,5	2,5	50	10	5	5	99,5
30	KP Hiu 14	PSDKP Tual	4	3,3	4,2	9,5	2,5	2,5	50	10	5	5	96
31	KP Hiu 15	PSDKP Tahuna	5	5	5	10	2,5	2,5	50	10	5	3	98
32	KP Hiu 16	PSDKP Belawan	5	5	5	10	2,5	2,5	50	10	5	5	100
33	KP Hiu 17	PSDKP Batam	5	5	5	10	2,5	2,5	50	10	5	5	100
34	KP Akar Bahar	Dit. POA	5	5	4	10	2,5	2,5	65			5	99
Total Indeks Kesiapan												3223,3	
Rata-rata Indeks Kesiapan												94,80	

Keterangan Nama Alat:

1. Peralatan Navigasi
2. Peralatan Komunikasi
3. Perlengkapan Keselamatan dan Pemadam Kebakaran
4. Konstruksi Kapal
5. Perlengkapan Tambat Labuh
6. Pendingin Ruangan
7. Mesin Utama
8. Mesin bantu
9. Sistem Propulsi dan Kemudi
10. Sistem Perpompaan

Kesiapan Prasarana Pengawasan SDKP berupa: gedung bangunan (kantor, Mess, dermaga, gudang, tempat penampungan sementara/DTC dan gedung serbaguna). Nilai capaian bersifat kumulatif setiap triwulan, dengan metode penilaian mandiri internal Ditjen SPDKP terhadap struktur, arsitektur, mekanikal dan elektrikal bangunan.

Kriteria kesiapan terbagi menjadi tiga, yaitu: nilai ≤ 75 adalah tidak siap, nilai 76 -95 adalah siap, dan nilai 96-100 adalah sangat siap. Penilaian kesiapan dilakukan secara bertahap. Pada triwulan II tahun 2024, sebanyak 4 (empat) UPT Pengawasan SDKP yang dinilai, sebagai berikut:

No	Jenis Prasarana	Triwulan II				Rata2	Bobot	Indeks
		Bitung	Tual	Benoa	Belawan			
1	Pos Pengawasan/Kantor	100	100	100	96,88	28,34857143	30	8,50
2	Bangunan Operator/Mess	100	100		93	29,3	25	7,33
3	Dermaga	100	100			40	20	8,00
4	Gudang	100	100		96	59,2	10	5,92
5	Tempat Penampungan Sementara	92			88	22,5	10	2,25
6	Gedung Serbaguna	100				100	5	5,00
Realisasi								37

Berdasarkan hasil perhitungan akumulasi realisasi indeks kesiapan prasarana pengawasan SDKP triwulan I sebesar 17,74 dan triwulan II sebesar 37, maka nilai indeks kesiapan prasarana pengawasan secara akumulasi hingga triwulan II adalah sebesar 54,74.

SASARAN PROGRAM 3

PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG EFEKTIF

IKU 7 Indeks Kinerja Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan Dan Perikanan

Realisasi Triwulan II Tahun 2020-2022				Tahun 2024					Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW II 2024	Realisasi TW II 2024	% thd TW II 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	95,40	80	50	95,91	120	120	-	-

Indeks kinerja penanganan pelanggaran Administratif bidang kelautan dan perikanan diperoleh dari hasil peneanaan sanksi administratif dan penyelesaian kewajiban pelaku atas peneanaan sanksi administratif, sebagai berikut:

Komponen	%	Bobot	Indeks
Peneanaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	100,00	70%	70,00
Penyelesaian kewajiban pelaku atas peneanaan sanksi administratif	86,36	30%	25,91
			95.91

Sanksi Administratif adalah sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggaran administrasi atau Ketentuan UU yang bersifat administratif, biasanya terkait perizinan (pemenuhan persyaratan perizinan) dan dilaksanakan oleh pejabat/badan Pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin. Peneanaan sanksi administratif menjadi sebuah langkah strategis dalam pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko pada sektor kelautan dan perikanan. Di sisi lain peneanaan sanksi administratif untuk memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.

Peneanaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang dikenakan, yaitu sanksi administratif yang diputuskan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan :

- UPT PSDKP untuk peneanaan sanksi atas pelanggaran SPKP (Sistem Pemantauan Kapal Perikanan) berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah;
- Dit. PP (Pusat) untuk peneanaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-2 (SP2)/surat penetapan denda administratif/rekomendasi pencabutan/pembekuan izin;
- UPT PSDKP/Dit. PP untuk peneanaan sanksi administratif Peneanaan Sanksi Administratif Pelanggaran Perizinan Berusaha di Bidang Kelautan dan Perikanan, Pemanfaatan Ruang Laut Importasi Komoditas Perikanan dan Pergaraman, Penangkapan Ikan Terukur dan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Teguran/Paksaan);
- Dit. PP (Pusat) untuk Penetapan denda administratif, atau rekomendasi Pembekuan/pencabutan izin / pemulihan fungsi ruang dari Dirjen PSDKP.

Capaian indeks kinerja penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan pada triwulan II tahun 2024 sebesar 95,91 diperoleh dari Persentase peneanaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan dengan realisasi sebesar 100% yang diperoleh dari jumlah peneanaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan sebanyak 88

pelanggaran dan total kasus pelanggaran administratif yang ditangani sebanyak 88 pelanggaran. Capaian pada triwulan II tahun 2024 ini tidak berbeda jauh dengan capaian pada triwulan II tahun 2023.

SASARAN PROGRAM 4

PENANGANAN TINDAK PIDANA BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG EFEKTIF

IKU 8 Indeks kinerja Penanganan Tindak Pidana bidang Kelautan dan Perikanan (TPKP)

Realisasi Triwulan II Tahun 2020-2023					Tahun 2024				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW II 2024	Realisasi TW II 2024	% thd TW II 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	79,11	86	50	92,63	120	107,71	-	-

Indeks kinerja penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan diperoleh dari hasil penyelesaian penyidikan dan kualitas penyidikan sebagai berikut:

Komponen	%	Bobot	Indeks
Persentase penyelesaian penyidikan TPKP	100	70%	70
Indeks kualitas penanganan TPKP	75,42	30%	22,63
			92,63

Persentase Penyelesaian penyidikan TPKP

Penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan diperoleh dari kasus selesai yaitu yang telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (Penyerahan Tahap II). Nilai capaian penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan pada triwulan I tahun 2024 ini sebesar 100%.

Indeks Kualitas Penanganan Tindak Pidana Bidang Kelautan dan Perikanan

kualitas penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan yang dilakukan melalui supervisi dan/atau monitoring evaluasi yang menggambarkan pemenuhan atas ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan termasuk penanganan barang bukti dan tersangka yang dihitung melalui rata-rata dari indeks perkasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani dengan diukur melalui kegiatan supervisi dan/atau evaluasi penanganan tindak pidana kelautan perikanan. Selain itu, supervisi kasus mendukung percepatan penanganan TPKP yang diproses oleh PPNS Perikanan, memecahkan masalah, hambatan, atau kendala yang dihadapi oleh Penyidik.

Capaian indikator kinerja indeks kualitas penanganan TPKP pada Triwulan II tahun 2024 diperoleh dari 3 komponen pembentuk yaitu persentase supervisi penyidikan, persentase

supervisi penanganan barang bukti, dan persentase supervisi penanganan awak kapal. Uraian penjelasan sebagai berikut:

a) Supervisi penyidikan

Kegiatan supervisi penyidikan merupakan proses penyidikan terhadap kasus yang belum terselesaikan atau belum P21/penyerahan tahap II. Supervisi dilakukan untuk mengetahui perkembangan proses penyidikan, memastikan proses penyidikan sesuai dengan juknis penyidikan TPKP, dan mendukung percepatan penanganan kasus TPKP. Nilai persentase supervisi penyidikan diukur melalui persentase total kasus yang disupervisi berbanding dengan total kasus yang ditangani. Kasus yang mampu dilakukan supervisi sebanyak 6 kasus dari total 10 kasus yang ditangani oleh PPNS Perikanan dengan rincian tindak pidana perikanan 6 kasus dan kelautan 4 kasus. Lokasi supervisi disajikan pada tabel berikut:

Lokasi supervisi penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan Triwulan II Tahun 2024

NO	NAMA TERSANGKA	LOKASI SUPERVISI	TAHAPAN PROSES HUKUM	SUDAH SUPERVISI
Tindak Pidana Perikanan				
1	Levie Cawasa	Pangkalan PSDKP Bitung	Tahap I	V
2	Min Tun	Pangkalan PSDKP Batam	Tahap I	V
3	Myo Myin Tun	Stasiun PSDKP Belawan	Tahap I	-
4	Rix Dias	Pangkalan PSDKP Bitung	Penyidikan	V
5	Juanito Capuyan	Stasiun PSDKP Tahuna	Penyidikan	-
6	Jos Mantelagheng	Stasiun PSDKP Tahuna		-
7	Sumarlan	Pangkalan PSDKP Tual		
8	Kyaw Htat	Pangkalan PSDKP Batam		
9	Jefri Setiawan	Stasiun PSDKP Belawan	Inkracht	V
10	Vo Van Cang	Pangkalan PSDKP Batam	Tahap II	V
11	Bui Chi Hong	Pangkalan PSDKP Batam	Tahap II	V
12	Saharudin	Stasiun PSDKP Kupang	Penyidikan	-
13	Wang Zeng Jun	Pangkalan PSDKP Tual	Tahap I	V
14	Charleston G Jumaat	Stasiun PSDKP Tahuna	P-21	V
15	Dionisio Jhoy G.	Stasiun PSDKP Tahuna	P-21	V
16	Jay Arr G.	Stasiun PSDKP Tahuna	P-21	V
17	Hanafi M	Stasiun PSDKP Tahuna	P-21	V
18	Alwi	Pangkalan PSDKP Tual	Tahap I	V
19	Hari Susanto	Satwas SDKP Banyuwangi	Penyidikan	-
20	Feri A Septiana	Stasiun PSDKP Cilacap	Penyidikan	-
21	Martinos P.	Pangkalan PSDKP Bitung	Penyidikan	-
22	Carmelo DP	Pangkalan PSDKP Bitung	Penyidikan	-
23	Fernan Calbisan	Stasiun PSDKP Tahuna	Penyidikan	-
24	Virgilio H.	Stasiun PSDKP Tahuna	Penyidikan	-
Tindak Pidana Kelautan				
1	Abdul Jabar R.	Pangkalan PSDKP Tual	P-21	V
2	Turang	Pangkalan PSDKP Bitung	Penyidikan	V
3	Arjuna	Pangkalan PSDKP Bitung	Penyidikan	V
4	Rangga Geni	Pangkalan PSDKP Bitung	Penyidikan	V
5	Bayun	Stasiun PSDKP Pontianak	Inkracht	V
6	Harson Ijar	Pangkalan PSDKP Bitung	Penyidikan	V
7	Yebi Harson	Pangkalan PSDKP Bitung	Penyidikan	V
8	Ebin	Pangkalan PSDKP Bitung	Penyidikan	-

NO	NAMA TERSANGKA	LOKASI SUPERVISI	TAHAPAN PROSES HUKUM	SUDAH SUPERVISI
9	Ismail bin Bahar	Stasiun PSDKP Tarakan	Penyidikan	-
10	Herman bin Hasan	Stasiun PSDKP Tarakan	Penyidikan	-

b) Supervisi Penanganan Barang Bukti

Kegiatan supervisi penanganan barang bukti dilaksanakan di 8 (delapan) lokasi UPT lingkup Ditjen PSDKP. Supervisi dilakukan pada tahapan penanganan barang bukti dalam pembuktian satu perkara tindak pidana kelautan dan perikanan atau lebih yang berkaitan sejak barang bukti tersebut disita sampai dengan diserahkan kepada Penuntut Umum (P21 Tahap II). Barang bukti tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani selama Triwulan II tahun 2024 yaitu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit. Tahapan pembobotan supervisi penanganan barang bukti adalah:

Lokasi supervisi tindak pidana kelautan dan perikanan Triwulan II tahun 2024

No.	UPT	Jumlah Barang Bukti
1	Stasiun PSDKP Belawan	2
2	Pangkalan PSDKP Batam	4
3	Stasiun PSDKP Pontianak	1
4	Stasiun PSDKP Tarakan	2
5	Pangkalan PSDKP Bitung	7
6	Stasiun PSDKP Tahuna	6
7	Stasiun PSDKP Kupang	1
8	Pangkalan PSDKP Tual	4
	TOTAL	27

c) Supervisi Penanganan Awak Kapal

Kegiatan supervisi penanganan awak kapal Triwulan II tahun 2024 dilaksanakan di 6 lokasi UPT lingkup Ditjen PSDKP. Supervisi dilakukan pada tahapan penanganan awak kapal atau pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan yang terdiri dari tersangka, saksi, dan non justitia (non tersangka). Dalam perkara pidana TPKP, bisa terdapat lebih dari 1 orang pelaku, tergantung dari kapasitas dan peran awak kapal. Hukum acara pidana di Indonesia, menghendaki penanganan para pelaku tindak pidana selaras dengan hak asasi manusia yang norma hukumnya diakui secara internasional. Selain itu, terdapat rantai birokrasi sebagaimana telah ditetapkan dalam UU Perikanan terkait dengan pemulangan dan penanganan awak kapal pelaku TPKP yang tidak dijadikan tersangka (non justitia) yang mana penanganannya dilakukan oleh kementerian yang membidangi keimigrasian, yakni Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM.

Awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani selama Triwulantahun 2024 yaitu sebanyak 156 awak kapal yang masuk dalam proses hukum.

SASARAN PROGRAM 5

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

1. IKM 9 Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP (nilai)

Realisasi Triwulan I Tahun 2020-2023				Tahun 2024				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024			
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW II 2024	Realisasi TW I 2024	% thd TW II 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra	
-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	

Kebijakan terkait pengawasan SDKP lingkup Ditjen PSDKP disusun melalui beberapa tahapan mulai dari perencanaan yang terdiri dari penyusunan agenda dan formulasi kebijakan hingga tahap pelaksanaan berupa implementasi kebijakan dan monev kebijakan. Kebijakan lingkup Ditjen PSDKP yang diukur kualitasnya adalah kebijakan setingkat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan terdapat dalam Prosun Peraturan Perundang-Undangan lingkup KKP.

Pada tahun 2024 ditargetkan nilai indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan PSDKP sebesar 70. Indikator kinerja ini belum dilakukan pengukuran pada periode triwulan II tahun 2024, namun beberapa kegiatan telah dilaksanakan antara lain: koordinasi lingkup Ditjen PSDKP dalam rangka persiapan kebijakan publik yang akan dilakukan penilaian. Hasil koordinasi dirumuskan hal penting dalam pelaksanaan penilaian yaitu setiap produk kebijakan Direktorat Jenderal PSDKP diukur/dinilai indeks kualitasnya menggunakan skema sebagai berikut:

No	Proses	%	Tahapan	%	Elemen Kunci
1.	Perencanaan Kebijakan	40	Agenda Setting	40	a. Identifikasi masalah (20%) b. Kajian terhadap isu-isu actual (50%) c. Konsultasi Publik (30%)
			Formulasi Kebijakan	60	a. <i>Forward looking</i> (15%) b. <i>Outward looking</i> (15%) c. <i>Learns Lessons</i> (15%) d. <i>Innovative</i> (15%) e. <i>Evidence based</i> (25%) f. <i>Compliance</i> (15%)
2.	Pelaksanaan Kebijakan	60	Implementasi Kebijakan	60	a. Dimensi Perencanaan (40%) b. Dimensi Kelembagaan (20%) c. Dimensi Komunikasi Kebijakan (40%)
			Monitoring dan Evaluasi Kebijakan	40	a. Pelaksanaan Monitoring (50%) b. Evaluasi efisiensi, efektivitas dan dampak (50%)

2. IKM 10. Unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Ditjen PSDKP

Realisasi Triwulan II Tahun 2020-2023				Tahun 2024				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024			
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW II 2024	Realisa si TW II 2024	% thd TW II 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra	
-	-	-	-	15	-	-	-	-	8	-	

Ditjen PSDKP telah mencanangkan seluruh unit kerja yang memiliki fasilitas pelayanan publik akan berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Sampai dengan tahun 2024 telah ditargetkan unit kerja dengan predikat WBK sebanyak 15 unit kerja, yang merupakan akumulasi dari tahun 2018. Khusus tahun 2024, ditargetkan 3 unit kerja yang berpredikat WBK yang pencapaiannya akan dilakukan penghitungan pada triwulan IV Tahun 2024. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian kinerja antara lain koordinasi secara terus menerus dalam rangka melengkapi dokumen-dokumen yang perlu disiapkan.

3. IKM 11 Level Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Direktorat Jenderal PSDKP (level)

Realisasi Triwulan II Tahun 2020-2023				Tahun 2024				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW II 2024	% thd TW II 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	-	3,3	-	-	-	-	3	-

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan Ditjen PSDKP. Penilaian untuk Ditjen PSDKP dengan mengadopsi nilai SPIP lingkup KKP yang telah dilakukan oleh Tim Asesor KKP dalam hal ini Inspektorat Jenderal KKP. Hasil penilaian tingkat maturitas SPIP tahun 2024 akan dilakukan pengukuran pada triwulan IV Tahun 2024.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya mendukung pencapaian kinerja antara lain: Koordinasi secara berkala dengan seluruh satker lingkup Ditjen PSDKP untuk melengkapi dokumen yang diperlukan untuk penilaian SPIP tahun 2024. Termasuk supervisi dan pendampingan kepada satker UPT yang diusulkan menjadi wilayah bebas dari korupsi tahun 2024.

4. IKM 12 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Ditjen PSDKP

Realisasi Triwulan II Tahun 2021-2023				Tahun 2024				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2021	2022	2023	Target 2024	Target TW II 2024	Realisasi TW II 2024	% thd TW II 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	82	77	83,54	108,49	101,87	76	109,92

Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PSDKP merupakan upaya mengukur kualifikasi ASN Ditjen PSDKP pada periode 2024 berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, profesionalitas dan disiplin pegawai. Nota Dinas Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi Nomor 1132/SJ.3/TU.140/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024 hal Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan II Tahun 2024, diperoleh hasil nilai IP ASN Ditjen PSDKP Semester 1 Tahun 2024 guna perhitungan capaian Indikator Kinerja IP ASN masing-masing

unit kerja lingkup Direktorat Jenderal PSDKP. Secara kumulatif nilai IP ASN Direktorat Jenderal PSDKP Semester 1 Tahun 2024 adalah 83,54 (melebihi target senilai 77). Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja antara lain adalah sinkronisasi data pada situs MyASN dengan SIMPEG KKP, pelayanan administrasi sumberdaya manusia aparatur, koordinasi penyelenggaraan bimbingan teknis, diklat teknis lingkup Ditjen PSDKP. Adapun beberapa kendala yang dihadapi antara lain adalah; pencantuman gelar terkendala kewajiban mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah; dan Penerbitan SK Tugas Belajar di Pusdik dan Biro SDMAO yang prosesnya lama.

5. IKM 13 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PSDKP

Realisasi Triwulan II Tahun 2021-2023			Tahun 2024				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024		
2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% thd TW I 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	84	-	-	-	-	87,75	-

Pencapaian nilai PM SAKIP Ditjen. PSDKP triwulan II Tahun 2024 belum dilakukan pengukuran, sehingga nilainya belum ada. Penilaian akan dilakukan terhadap komponen utama SAKIP yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi kinerja. Sebagai upaya mendukung pencapaian kinerja, telah dilakukan beberapa kegiatan utama, antara lain:

- Perencanaan kinerja. Rapat Kerja Teknis Pengawasan SDKP; Penyusunan rencana kerja 2024, Penyusunan dan penandatanganan perjanjian kinerja level 2, penyusunan manual IKU, pohon IKU, matriks cascading dari level 1 hingga ke level terbawah.
- Pengukuran Kinerja. Pengukuran kinerja triwulan IV tahun 2023 dan kinerja triwulan I tahun 2024, pengisian capaian aplikasi kinerjaku, input data kinerja tahun 2024 pada aplikasi kinerjaku, pengisian ESR Kemenpan RB.
- Pelaporan Kinerja. Penyusunan laporan kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2023 dan laporan kinerja Ditjen PSDKP triwulan I Tahun 2024.

6. IKM 14 Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Ditjen PSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran Ditjen PSDKP Tahun 2023

Realisasi Triwulan II Tahun 2021-2023			Tahun 2024				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024		
2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	% thd TW I 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	≤0,5	-	-	-	-	-	-

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Ditjen PSDKP tahun 2023 didasarkan pada empat kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan

pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian intern. Hasil pemeriksaan belum diterbitkan oleh BPK sehingga di periode triwulan II 2024, belum ada capaian. Sampai dengan periode triwulan I 2024, Ditjen PSDKP memiliki sisa temuan BPK RI sebanyak 16 rekomendasi yang terdiri dari: 1 rekomendasi atas laporan kinerja Semester I TA 2010 atas pengadaan kapal pengawas, 4 rekomendasi atas LK 2017, 2 rekomendasi atas kinerja *illegal fishing* Tahun 2017 s.d. Semester I 2020, 2 rekomendasi atas LK 2021 dan 7 rekomendasi atas LK 2022.

Upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan yaitu rapat progress tindak lanjut setiap bulan guna mendapatkan informasi lebih lanjut dari unit kerja yang menjadi PIC atas temuan tersebut sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.

7. IKM 15 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PSDKP

Realisasi Triwulan II Tahun 2021-2023			Tahun 2024				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024		
2021	2022	2023	Target 2024	Target TW II 2024	Realisasi TW II 2024	% thd TW II 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
89,80	46,81	100	80	80	99,19	120	120	80	120

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PSDKP berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 1141/ITJ.0/TU.140/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024. Hingga 31 Juni 2024 dari 124 rekomendasi telah ditindak lanjuti hingga tuntas sebanyak 123 rekomendasi.

Lebih lanjut, upaya yang dapat dilakukan untuk peningkatan kinerja diantaranya 1) melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2) selalu adaptif dan responsif dengan perubahan kebijakan dengan koordinasi dengan unit kerja di atasnya atau yang terkait 3) monitoring rutin tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja dengan eselon I lingkup KKP, sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dengan eselon I Lingkup KKP

No	Unit Kerja	Jumlah Rekom	Tindak Lanjut (Tuntas)	% Tuntas	Sisa Rekom	(%) Sisa Rekom
1	Setjen	93	90	96.77%	3	3.23%
2	Ditjen PKRL	280	269	96.07%	11	3.93%
3	Ditjen Perikanan Tangkap	319	263	82.45%	56	17.55%
4	Ditjen PSDKP	124	123	99.19%	1	0.81%
5	Ditjen Perikanan Budi Daya	488	445	91.19%	43	8.81%
6	BPPSDMKP	110	106	96.36%	4	3.64%
7	Ditjen PDSPKP	132	117	88.64%	15	11.36%
8	BPPMHKP	201	180	89.55%	21	10.45%
9	Itjen	27	26	96.30%	1	3.70%
TOTAL		1774	1619	91.26%	155	8,74%

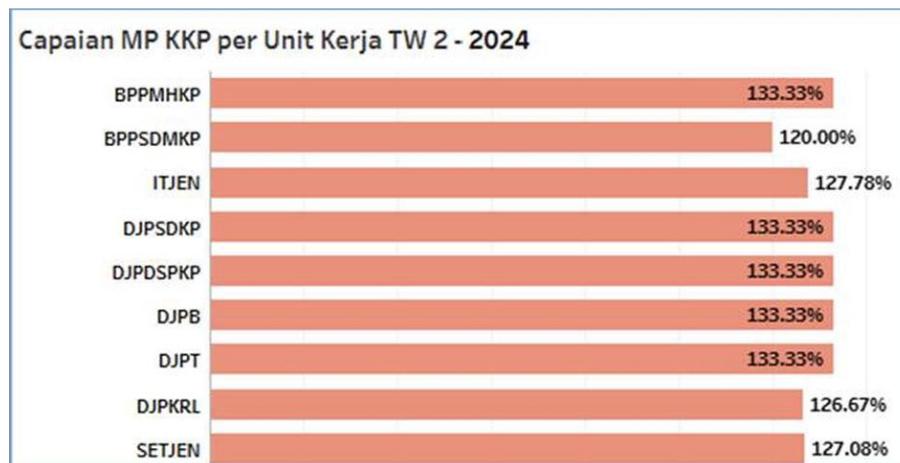
8. IKM 16 Presentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar

Realisasi Triwulan II Tahun 2021-2023			Tahun 2024				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024		
2021	2022	2023	Target 2024	Target TW II 2024	Realisasi TW II 2024	% thd TW II 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
99,06	97,34	98,37	94	94	133,33	120	120	94	

Capaian IKU “Persentase Unit Kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar” sebesar 133,33 yang diperoleh dari pemenuhan dokumen dan keaktifan dengan metode perhitungan menggunakan aplikasi *collaboration office* (<https://portal.kkp.go.id>) pada menu Pengetahuan. Setiap pegawai dapat mengunggah berupa kegiatan, infografis, dan video/jurnal pengetahuan.

Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan indikator ini diantaranya adalah beberapa pegawai belum mengerti cara menggunakan aplikasi *collaboration office* termasuk cara membuat video pengetahuan. Selain itu, ditemukan juga ketidaksesuaian tanggal kegiatan dengan periode yang dinilai.

Apabila dibandingkan dengan Eselon I lingkup KKP, seperti disajikan pada grafik dibawah ini.



9. IKM 17 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen PSDKP

Realisasi Triwulan II Tahun 2021-2023			Tahun 2024				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024		
2021	2022	2023	Target 2024	Target TW II 2024	Realisasi TW II 2024	% thd TW II 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	80	-	-	-	-	-	-

Tingkat kepatuhan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) lingkup Ditjen PSDKP tahun 2024 dilihat berdasarkan ¹⁾ ketersediaan manajemen resiko pengadaan barang jasa strategis lingkup Ditjen PSDKP ²⁾ perencanaan dan persiapan pengadaan ³⁾ presentase pemilihan penyedia barang/Jasa yang dilaksanakan melalui SPSE ⁴⁾ kesesuaian tahap pelaksanaan ⁵⁾ Laporan penyelenggaraan PBJ ⁶⁾ persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen PSDKP. Penghitungan tingkat

kepatuhan pengadaan barang/jasa menggunakan Lembar Kerja Penilaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan PBJ. Sampai dengan triwulan II 2024 belum dilakukan penilaian dikarenakan targetnya ditetapkan pada triwulan IV tahun 2024.

Upaya yang sudah dilakukan untuk tepat dalam pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen PSDKP diantaranya koordinasi lingkup Ditjen PSDKP dalam rangka inventarisasi pengadaan barang dan Jasa 2024, pembahasan TKDN dan pengisian kertas kerja penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa, pembahasan usulan rekomendasi PBJ produk impor dan produk dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri dibawah 25%, pemantauan progres pengadaan barang/jasa secara reguler menggunakan kertas kerja pemantauan dan progres pada aplikasi AMEL.

10. IKM 18 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Ditjen PSDKP

Realisasi Triwulan II Tahun 2021-2023				Tahun 2024				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2021	2022	2023	Target 2024	Target TW II 2024	Realisasi TW II 2024	% thd TW II 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	80	-	-	-	-	-	-

Tingkat kepatuhan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) lingkup Ditjen PSDKP tahun 2024 dilihat berdasarkan ¹⁾ pengelolaan rencana kebutuhan BMN, ²⁾ ketersediaan usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja ke pengguna barang maupun pengelola barang, ³⁾ penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset), ⁴⁾ pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal didukung BAST/Berita Acara pemakaian dan ⁵⁾ Penyusunan Laporan BMN yang tepat waktu. Penghitungan tingkat kepatuhan pengelolaan BMN menggunakan Lembar Kerja Penilaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN.

Penghitungan kinerja ditetapkan tahunan, sehingga periode trwulan II tidak ada capaian. Upaya yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian kinerja yaitu penandatanganan Berita Acara Utilisasi Penggunaan BMN dengan Ditjen Perikanan Tangkap. Selain itu, dilakukan pengelolaan BMN secara rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

11. IKM 19 Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PSDKP

Realisasi Triwulan II Tahun 2021-2023				Tahun 2024				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2021	2022	2023	Target 2024	Target TW II 2024	Realisasi TW II 2024	% thd TW II 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	76	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal

dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Sehingga ditetapkan kriteria Inovasi adalah memiliki Kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan. Sampai dengan triwulan II 2024 belum dilakukan penilaian dikarenakan targetnya ditetapkan pada triwulan IV tahun 2024.

12. IKM 20 Indeks Kepuasan Masyarakat unit layanan publik Ditjen PSDKP

Realisasi Triwulan II Tahun 2021-2023				Tahun 2024				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2021	2022	2023	Target 2024	Target TW II 2024	Realisasi TW II 2024	% thd TW II 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	85	85	91,32	107,44	107,44	-	-

Berdasarkan Kepmen KP 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, survei dilakukan terhadap 5 produk layanan melalui aplikasi SiSUSAN KKP yang diperoleh dari 1502 responden pada 15 Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP). Nilai SKM Direktorat Jenderal PSDKP setelah dikonversi memperoleh nilai 91,32 dengan mutu pelayanan kategori "Sangat Baik". Capaian ini di atas target triwulan II 2024 yang sebesar 85. Adapun kendala yang dihadapi diantaranya adalah keterlambatan upload Laporan SKM ke aplikasi Susan, dan kendala di aplikasi Susan sehingga filenya tidak bisa dibuka. Dalam rangka perbaikan kedepan, UPP didorong melakukan upload dokumen ke aplikasi Susan KKP dan menyampaikan kepada Pusdatin untuk gangguan dimaksud. Pada periode selanjutnya, UPP diharapkan untuk terus meningkatkan hasil SKM dengan melakukan sosialisasi pemahaman dalam pengisian kuisisioner.

13. IKM 21 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP

Realisasi Triwulan II Tahun 2021-2023				Tahun 2024				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2021	2022	2023	Target 2024	Target TW II 2024	Realisasi TW II 2024	% thd TW II 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	93,76	83	90,48	109,01	96,50	80	113,1

Pengukuran Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran meliputi 4 (empat) aspek yaitu: aspek kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan (3 indikator), kepatuhan terhadap regulasi (4 indikator), efektivitas pelaksanaan kegiatan (4 indikator) dan efisiensi pelaksanaan kegiatan (2 indikator). Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan

yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Online Monitoring SPAN (OM SPAN) Kementerian Keuangan. Capaian Nilai Ditjen. PSDKP triwulan II Tahun 2024 sebesar 90,48 dari target 83.

Beberapa kegiatan yang mendorong pencapaian target diantaranya adalah pemantauan regular lingkup KKP untuk IKPA oleh Biro Keuangan KKP serta sosialisasi strategi pencapaian target oleh Biro Keuangan KKP bagi unit kerja lingkup KKP, yang diikuti hingga unit kerja terkecil lingkup Ditjen PSDKP. Sebagai upaya perbaikan untuk periode selanjutnya direkomendasi untuk sinkronisasi hal III DIPA sebelum bulan berakhir dengan memantau kesesuaian RPD dengan penyerapan anggaran.

14. IKM 22 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP

Realisasi Triwulan II Tahun 2021-2023				Tahun 2024				Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024	
2021	2022	2023	Target 2024	Target TW II 2024	Realisasi TW II 2024	% thd TW II 2024	% thd tahun 2024	Target 2024	%Capaian thd target akhir Renstra
-	-	-	86	-	-	-	-	89	-

Pengukuran IKU Nilai Kinerja Anggaran (NKA) meliputi beberapa capaian yaitu realisasi anggaran, capaian output, capaian IKU. Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Monitoring Anggaran dan Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan. Capaian Nilai Ditjen. PSDKP triwulan II Tahun 2024 belum dilakukan pengukuran kinerja, sehingga tidak ada nilai yang disajikan.

Beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian agar diperoleh nilai optimal nilai kinerja anggaran tahun 2024, antara lain:

- Capaian Sasaran Program, dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi capaian kegiatan program dengan target sasaran program;
- Penyerapan Anggaran, dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker.
- Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satker dari rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah bulan;
- Capaian Keluaran Program, dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran;
- Tingkat efisiensi, dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran;
- Rata-rata satker diperoleh dari nilai kinerja satuan kerja lingkup Ditjen PSDKP terdiri dari 5 satker pusat, 14 satker UPT PSDKP dan 34 Staker Dekonsentrasi.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai kinerja ini antara lain sosialisasi pengisian aplikasi sistem monitoring anggaran dan kinerja terpadu (SMART) dan monitoring secara

berkala pengisian aplikasi SMART terhadap seluruh satker lingkup Ditjen PSDKP. Adapun kendala yang dihadapi adalah adanya pergantian operator baru di Sakter sehingga menyebabkan banyak yang belum paham terkait cara penginputan CRO di Aplikasi SAKTI dan monitoring CRO pada Aplikasi Monev Kemenkeu sehingga Perlu dilakukan sosialisasi Kembali terkait cara penginputan dan monitoring NKA agar bisa mencapai target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

C. Efisiensi

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya anggaran Ditjen. PSDKP. Penghitungan efisiensi mengacu pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 tahun 2021 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi keluaran anggaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rata-rata efisiensi penggunaan sumber daya khususnya anggaran Ditjen PSDKP belum bisa dilakukan penghitungan triwulanan, namun dihitung tahunan.

D. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran Ditjen. PSDKP TA. 2024 sebesar Rp. 1.141.397.068.000,-. Anggaran tersebut didistribusikan pada 5 (lima) satker pusat, 14 (empat belas) UPT Pengawasan SDKP dan 34 (tiga puluh empat) satker Dekonsentrasi/TP. Realisasi Anggaran Ditjen. PSDKP sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 sebesar **Rp 394.768.348.351,-** atau sebesar 34,59% secara aktual, atau sebesar 50,47% jika tidak memperhitungkan AA serta termasuk Outstanding Kontrak (OK). Rincian anggaran dan realisasi untuk mendukung pencapaian sasaran program Ditjen PSDKP Tahun 2024, melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

Tabel Anggaran dan Realisasi Satker Ditjen. PSDKP tahun 2024
(data OMSpan 30 Juni 2024)

SATKER	PAGU	OUTSTANDING KONTRAK	AA	PAGU SETELAH AA	REALISASI	% REALISASI	REALISASI SETELAH AA	REALISASI +OK (%)
DIREKTORAT POA	445.134.101.000	56.231.040.410	42.086.329.000	403.047.772.000	154.070.562.441	34,61%	38,23%	52,18%
DIREKTORAT PPSDK	16.701.293.000	180.000.000	4.000.000.000	12.701.293.000	4.649.534.748	27,84%	36,61%	38,02%
DIREKTORAT PPSDP	11.768.640.000	162.720.000	1.700.000.000	10.068.640.000	3.286.865.201	27,93%	32,64%	34,26%
DIREKTORAT PP	10.853.500.000		2.000.000.000	8.853.500.000	2.621.118.840	24,15%	29,61%	29,61%
SEKRETARIATDITJEN. PSDKP	115.517.079.000	570.160.250	5.000.000.000	110.517.079.000	45.475.611.766	39,37%	41,15%	41,66%
UPT PSDKP	533.538.287.000	82.219.498.360	28.218.243.000	505.320.044.000	184.415.804.573	34,56%	36,49%	52,77%
DEKONSENTRASI	7.884.168.000		-	7.884.168.000	248.850.782	3,16%	3,16%	3,16%
TOTAL	1.141.397.068.000	139.363.419.020	83.004.572.000	1.058.392.496.000	394.768.348.351	34,59%	37,30%	50,47%

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada triwulan II Tahun 2024, kinerja Ditjen PSDKP telah menapai target untuk 12 indikator kinerja dari 22 indikator kinerja utama, serta memperoleh nilai kinerja organisasi (NKO) sebesar **112,92%** pada kategori “**Istimewa**”. Pencapaian kinerja tersebut didukung dengan realisasi sebesar **Rp 394.768.348.351,-** atau sebesar 34,59% secara aktual, atau mencapai **50,47%** jika realisasi memperhitungkan setelah Automatic Adjustment (AA) dan Outstanding Kontrak.

B. Langkah-Langkah Perbaikan

Ditjen. PSDKP terus berupaya untuk meningkatkan kinerja yang telah dicapai melalui langkah-langkah perbaikan antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja eselon I lingkup KKP terkait pemanfaatan PNBPN untuk operasi kapal pengawas di zona 3 PIT;
2. Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan SDKP melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi untuk mengoptimalkan pengawasan SDKP;
3. Melakukan penelaahan dan penajaman formulasi penghitungan kinerja tahun 2024.